

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Salah satu sektor yang memiliki peranan yang cukup besar dalam pembangunan perekonomian nasional adalah sektor pariwisata. Dunia pariwisata Indonesia sempat lumpuh akibat adanya krisis moneter pada tahun 1998. Selain itu juga bencana dan teror dari orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang terus-menerus melanda Indonesia membuat kunjungan wisatawan semakin berkurang.

Seiring berjalannya waktu, pariwisata di Indonesia mulai bangkit dari keterpurukan, hal ini ditandai dengan diadakannya program *visit* Indonesia oleh pemerintah. Program *Visit* Indonesia adalah salah satu kegiatan yang dicanangkan pemerintah untuk meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan. Program ini tidak hanya dilakukan melalui promosi di media informasi saja, namun dibarengi dengan membenahi setiap sarana dan prasarana kepariwisataan serta dengan menyelenggarakan berbagai perhelatan dalam rangka menarik wisatawan. Program *visit* Indonesia ini dinilai cukup berperan di dalam meningkatkan kembali kunjungan wisatawan ke Indonesia meski tidak mencapai target yang dicanangkan yaitu 7 juta orang.

Sektor pariwisata telah menjadi primadona dalam usaha peningkatan perekonomian berbagai daerah di Indonesia. Meningkatnya kecenderungan orang untuk berpergian menyebabkan setiap daerah di Indonesia bersaing

untuk menawarkan berbagai potensi daerahnya untuk dikelola dan dikunjungi. Sumber dan potensi kepariwisataan Indonesia yang masih belum tergali semua memerlukan perencanaan dan pengembangan yang menyeluruh dan terpadu dengan sektor-sektor pembangunan lainnya, sehingga diperlukan suatu keterpaduan dalam perencanaan serta pengembangan pengembangan Wilayah Tujuan Wisata (WTW), Daerah Tujuan Wisata (DTW), maupun Kawasan Tujuan Wisata (KTW).

Berbagai potensi dan sumber daya pariwisata di Indonesia diarahkan untuk dapat meningkatkan kapasitas pengembangan di daerah otonom masing-masing. Untuk itu upaya-upaya pengembangan pariwisata harus mengacu dan konsisten dengan kebijakan-kebijakan yang sudah ada baik di tingkat nasional, propinsi, dan lintas bidang untuk memberikan arah pembangunan kepariwisataan daerah yang terpadu dan sinergis dalam rangka mendukung pengembangan wilayah dan pemberdayaan masyarakat.

Alasan utama pengembangan pariwisata pada suatu daerah adalah memberikan dampak positif pembangunan perekonomian daerah tersebut. Manfaat yang diperoleh masyarakat setempat apabila usaha pariwisata dikembangkan dengan baik adalah dapat memberikan dampak positif baik secara langsung maupun tidak langsung. Secara langsung, kegiatan pariwisata akan menyerap banyak tenaga kerja pada proyek-proyek pembangunan di tempat rekreasi, objek wisata, hotel, restoran, serta transportasi. Secara tidak langsung, pengembangan sektor pariwisata diharapkan dapat meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan yang selanjutnya akan menimbulkan permintaan-

permintaan baru terhadap hasil-hasil pertanian, perkebunan, peternakan, kerajinan, maupun industri rumah tangga.

Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan pariwisata telah mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata. Adanya infrastruktur yang baik menjadi salah satu motivasi wisatawan untuk mengunjungi suatu destinasi wisata. Pola pengelolaan kawasan pariwisata yang tidak menyeluruh (*comprehensive*) telah menimbulkan dampak negatif yang mengakibatkan menurunnya daya tarik obyek wisata.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dan vital untuk mempercepat proses pembangunan nasional. Infrastruktur juga memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi. Ini mengingat gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu negara tidak dapat pisahkan dari ketersediaan infrastruktur seperti transportasi, telekomunikasi, sanitasi, dan energi. Oleh karena itu, pembangunan sektor ini menjadi fondasi dari pembangunan ekonomi selanjutnya. Dalam konteks ekonomi, infrastruktur merupakan modal sosial masyarakat (*social overhead capital*) yaitu barang-barang modal esensial sebagai tempat bergantung bagi perkembangan ekonomi dan merupakan prasyarat agar berbagai aktivitas masyarakat dapat berlangsung. Dengan kata lain, infrastruktur merupakan katalisator di antara proses produksi, pasar dan konsumsi akhir.

Keberadaan infrastruktur memberikan gambaran tentang kemampuan berproduksi masyarakat dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang tinggi tidak mungkin dicapai apabila

tidak ada ketersediaan infrastruktur yang memadai atau dengan kata lain infrastruktur adalah *basic determinant* atau kunci bagi perkembangan ekonomi.

Secara tidak langsung, pembangunan infrastruktur akan mendukung produktivitas sektor ekonomi lainnya sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kondisi sosial-budaya kehidupan masyarakat melalui efek berganda. Sedangkan secara langsung terkait sektor konstruksi, infrastruktur juga akan menciptakan kesempatan kerja dan usaha. Oleh karena itu, keberadaan infrastruktur yang baik akan dapat mendorong terciptanya stabilitas berbagai aspek dalam masyarakat guna menunjang laju pembangunan nasional. Hudson, Haas, Uddin (1997:122), menyatakan bahwa, kategori fasilitas infrastruktur terdiri dari transportasi, air dan air limbah, pengelolaan limbah, produksi dan distribusi energi, bangunan gedung, fasilitas rekreasi, komunikasi.

Pembangunan sektor transportasi merupakan bagian yang amat penting dalam pembangunan nasional. Tujuan pembangunan transportasi adalah meningkatkan pelayanan jasa transportasi secara efisien, handal, berkualitas, aman dan harga terjangkau dan mewujudkan sistem transportasi nasional secara intermoda dan terpadu dengan pembangunan wilayahnya dan menjadi bagian dari suatu sistem distribusi yang mampu memberikan pelayanan dan manfaat bagi masyarakat luas, termasuk meningkatkan jaringan desa-kota yang memadai.

Kendala yang dihadapi sektor transportasi meliputi aspek kelembagaan dan peraturan, sumber daya manusia, teknologi, pendanaan investasi, kapasitas,

serta operasi dan pemeliharaan. Pada aspek kelembagaan dan peraturan masih banyak terjadi ketidakefisienan pengelolaan dan pembinaan infrastruktur yang diakibatkan kurang efektifnya koordinasi dan pembagian peran dan fungsi antar lembaga, terutama dalam hal ketidakjelasan hubungan antar regulator, *owner* dan operator. Dari aspek pendanaan akibat karakteristik infrastruktur transportasi yang membutuhkan biaya investasi yang besar dan jangka waktu pengembalian yang panjang, sedang sebagian besar tarif tidak dapat mencapai tingkat *full cost recovery* secara finansial, serta masih banyaknya penyelenggaraan infrastruktur transportasi yang dilakukan secara monopoli, sehingga peran pemerintah sebagai regulator masih sangat diperlukan.

Salah satu masalah kapasitas sektor transportasi adalah ketidakcukupan kapasitas jalan, terutama dilihat dari perkembangan kapasitas prasarana jalan, dibandingkan dengan perkembangan armada di jalan. Selain itu kondisi prasarana jalan yang rata-rata semakin menurun pelayanannya, seperti optimasi kapasitas jalan yang masih rendah, terutama masih banyaknya daerah rawan kemacetan akibat penggunaan badan dan daerah milik jalan untuk kegiatan sosial ekonomi, pasar, parkir, dan sebagainya. Serta sistem manajemen lalu lintas yang belum optimal.

Kabupaten Tangerang termasuk salah satu daerah tingkat dua yang menjadi bagian dari wilayah Propinsi Banten. Kabupaten Tangerang terletak di bagian Timur Propinsi Banten pada koordinat $106^{\circ}20'-106^{\circ}43'$ Bujur Timur dan $6^{\circ}00'-6^{\circ}20'$ Lintang Selatan. Luas wilayah Kabupaten Tangerang 1.110,38 Km² atau 12,62 % dari seluruh luas wilayah Propinsi Banten.

Pertumbuhan penduduk daerah ini cukup pesat. Total penduduk 2.959.600 jiwa, rata-rata pertumbuhan 4,32% per tahun yang didominasi oleh kelompok umur berusia muda. Kelompok umur 0-14 tahun berjumlah 1.195.589 jiwa atau sebesar 40%. Kelompok umur 15-64 tahun sebesar 1.709.158 jiwa atau 57,6%. Sedangkan pada kelompok umur 65 tahun ke atas sebanyak 65.853 jiwa atau 2,2%.

Luas wilayah Kabupaten Tangerang 111.038 ha. Dibagi ke dalam 29 kecamatan dan 316 desa dan kelurahan. Keseluruhan kondisi wilayah memiliki topografi yang relatif datar dengan kemiringan tanah rata-rata 0-3% menurun. Ketinggian wilayah sekitar antara 0-85 m di atas permukaan laut. Curah hujan setahun rata-rata 1.475 mm dan temperatur udara berkisar antara 23 °C - 33 °C. Iklim ini dipengaruhi oleh wilayah di bagian utara yang merupakan daerah pesisir pantai sepanjang kurang lebih 50 km.

Kabupaten Tangerang memiliki banyak potensi wisata terutama untuk sektor wisata bahari. Terdapat delapan lokasi potensi objek wisata, yaitu Kawasan Pantai Selebaran Jati, Pantai Muara, Muara Kalong, Pulau Cangkir, Pantai Dadap, Pantai Tanjung Kait, Tanjung Burung, dan Pantai Tanjung Pasir. Kawasan wisata Pantai Tanjung Pasir terletak di Desa Tanjung Pasir Kecamatan Teluk Naga. Keunggulan Tanjung Pasir ialah pantainya yang landai dengan ombak yang tenang, cocok untuk berenang bagi anak-anak dan anggota keluarga. Posisi Pantai Tanjung Pasir cukup strategis, berhadapan langsung dengan gugusan Kepulauan Seribu. Akses untuk menuju Pantai Tanjung Pasir

cukup mudah yaitu hanya 20 km dari arah Kota Tangerang dan tidak jauh dari kawasan bandara internasional Soekarno Hatta, sedangkan waktu tempuh dari arah Jakarta kurang dari satu jam.

Berdasarkan pengamatan peneliti serta wawancara kepada pengunjung, masyarakat sekitar, dan pihak pemerintah daerah sendiri sampai saat ini pengembangan dan pengelolaan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir belum maksimal. Hal ini dapat dirasakan dari kurangnya fasilitas yang ada, tidak terawatnya infrastruktur kawasan, tidak adanya sistem pengelolaan kebersihan, serta jalan yang rusak menuju dan di dalam kawasan. Oleh karena itu dibutuhkan penanganan dan pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir terutama dari sektor infrastrukturnya dan pengelolaannya agar menjadi lebih *representative* dan mempunyai nilai lebih. Untuk menambah nilai Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir agar lebih *representative* dapat diatasi dengan adanya strategi-strategi pengembangan khususnya dalam bidang infrastruktur dan pengelolaan, karena kedua bidang ini merupakan bagian penting dalam pengembangan kawasan. Dengan strategi-strategi tersebut dapat menjadi awal pengembangan kepariwisataan yang berkelanjutan di kabupaten Tangerang.

Berdasarkan uraian tentang potensi dan permasalahan yang ada di Pantai Tanjung Pasir inilah yang membuat penulis tertarik untuk membahasnya dan mengambil judul : “PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR KAWASAN WISATA PANTAI TANJUNG PASIR TANGERANG”

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian tersebut, maka penulis menyederhanakan permasalahan dan memperjelas arah penelitian sesuai dengan judul yang telah dikemukakan di atas. Maka dapat dirumuskan permasalahan yang ada sebagai berikut:

1. Bagaimana kondisi infrastruktur di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir saat ini?
2. Apasajakah pendukung, penghambat, peluang, serta ancaman dalam pengembangan Infrastruktur Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir?
3. Bagaimana strategi pengembangan infrastruktur yang dapat diterapkan di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dan penulisan ini adalah untuk :

1. Mengidentifikasi kondisi infrastruktur di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir saat ini.
2. Mengidentifikasi pendukung, penghambat, peluang, serta ancaman dalam infrastruktur Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir.
3. Menganalisis strategi pengembangan infrastruktur seperti apakah yang dapat diterapkan di Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir.

D. Manfaat Penelitian

Adapun hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat secara praktis maupun teoritis

1. Manfaat akademis

Manfaat akademis, yaitu sebagai salah satu sumbangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan sehingga menambah wawasan khususnya pada pengembangan sektor.

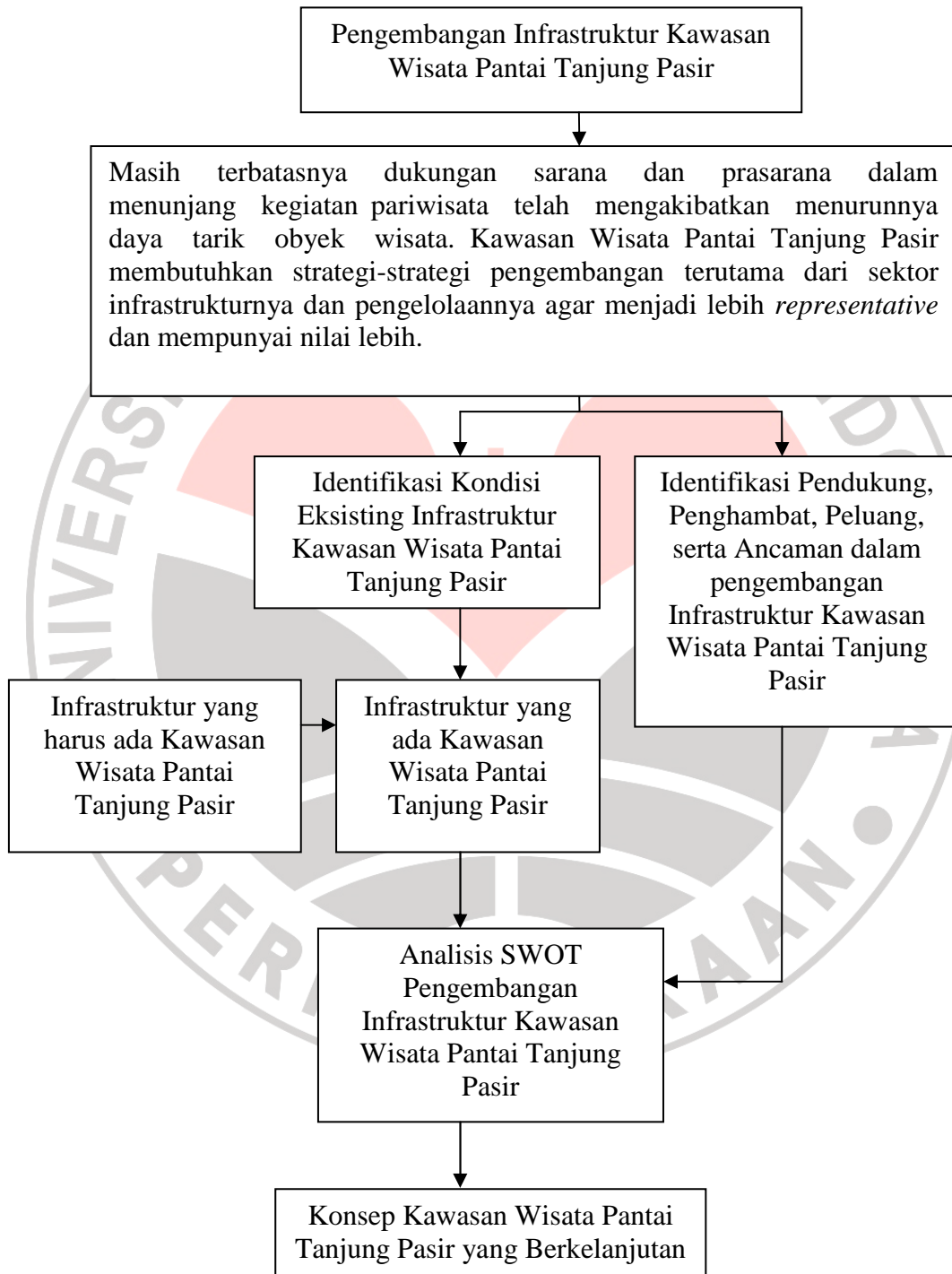
2. Manfaat praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi pemerintah daerah, khususnya bagi Dinas pariwisata dalam pengembangan daerah tujuan wisata dengan :

- a. Teridentifikasinya potensi dan masalah pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir.
- b. Terwujudnya suatu konsep pengembangan infrastruktur dalam pengembangan Kawasan Wisata Pantai Tanjung Pasir yang berkelanjutan.

E. Kerangka Pemikiran

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran



Sumber : Hasil Olahan Peneliti, 2010